



LEMBARAN KALURAHAN JATIAYU

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 6

Tahun : 2025

LURAH JATIAYU

KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN JATIAYU

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JATIAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3
 - b. Tahun 2025;
 - c. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Jatiayu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
15. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun

2018 Tentang Tunjangan Hari Raya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 26);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan ;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
25. Surat Edaran Gunungkidul Nomor

- B/100.3.8.1/310/ 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
26. Peraturan Desa Jatiayu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatiayu Tahun 2019 Nomor 2);
 27. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Jatiayu nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2022 Nomor 8);
 28. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jatiayu Nomor 2 Tahun 2025);
 29. Peraturan Kalurahan Jatiayu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Jatiayu Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JATIAYU
dan
LURAH JATIAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.888.107.500,00
2. BelanjaDesa	<u>Rp 3.686.135.086,00-</u>
Surplus/Defisit	Rp 201.972.414,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 48.027.586,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 250.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	<u>Rp (201.972.414,00)+</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u><u>Rp 0,00</u></u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Jatiayu.

Ditetapkan di Jatiayu
pada tanggal , 24 Desember 2025
LURAH JATIAYU,

TTD

WASITO

Diundangkan di Jatiayu
pada tanggal, 24 Desember 2025
CARIK,JATIAYU

TTD

SETIYAWAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN JATIAYU
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.100.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.856.807.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.200.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.888.107.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	984.915.956,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.611.560.908,00	
5.3.	Belanja Modal	1.012.666.372,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	76.991.850,00	
	JUMLAH BELANJA	3.686.135.086,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	201.972.414,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.027.586,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	48.027.586,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	250.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	240.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(201.972.414,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatiayu, 24 Desember 2025

Lurah

TTD

Wasito, S.E

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN JATIYU
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	18.100.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.856.807.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.200.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.888.107.500,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.271.117.136,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.119.737.836,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.710.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	47.710.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	808.925.000,00	ADD, PAD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	808.925.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	54.958.176,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	54.958.176,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	40.120.000,00	DLL, PBH, PBP
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.120.000,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	62.247.780,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	61.047.780,00	
	1.1.05 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.468.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.468.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.330.880,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.330.880,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	47.978.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.978.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	5.970.000,00	
	1.2.94	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.770.000,00	PAD
	1.2.94 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
	1.2.95	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	2.200.000,00	PBH
	1.2.95 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	38.020.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	11.605.000,00	PAD, PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.605.000,00	
1.3.01	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.875.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.875.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	4.540.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	102.001.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.350.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.350.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.251.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.251.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.875.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.875.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	3.300.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.314.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.314.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	35.740.000,00	DDS, PBP
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.740.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.296.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.296.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	36.600.000,00	PBH, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	12.275.000,00	PBH
1.4.92	5.1.	Belanja Pegawai	12.275.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	5.388.300,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.388.300,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.388.300,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.028.572.572,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	78.080.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	58.980.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.980.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	7.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	7.350.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.350.000,00	DDS
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	4.250.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	165.126.600,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	14.601.600,00	DDS, PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.601.600,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	13.500.000,00	PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.525.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.525.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.000.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	6.500.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	5.000.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	86.400.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.400.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	27.600.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	901.826.372,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	417.953.840,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	415.233.840,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	168.919.372,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	167.619.372,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	176.546.264,00	DDS
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	174.806.264,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	138.406.896,00	DDS
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	138.106.896,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	870.739.600,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	61.875.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.875.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	804.739.600,00	DDS, PBP
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	804.739.600,00	
2.4.93		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	4.125.000,00	DDS
2.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.125.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.800.000,00	
2.5.92		Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	10.800.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	2.000.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>140.759.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.500.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	4.300.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.300.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	1.200.000,00	PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	6.907.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.907.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.907.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	106.260.300,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	104.350.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.450.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	102.900.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.910.300,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.910.300,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.091.700,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	6.420.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.420.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	9.200.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.790.000,00	PAD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.681.700,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.681.700,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>168.694.528,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	132.444.528,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	38.150.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.150.000,00	
4.2.91		Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	3.675.000,00	DDS
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	90.619.528,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	90.619.528,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.725.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.575.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.575.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.150.000,00	PBP
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	3.550.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.550.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	11.800.000,00	DLL
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.800.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.950.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	2.600.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	2.600.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	3.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde s)	3.000.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	3.625.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonom i produktif	3.625.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.625.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>76.991.850,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.150.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	15.150.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.150.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	15.041.850,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	15.041.850,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.041.850,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	46.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	46.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	46.800.000,00	
JUMLAH BELANJA			3.686.135.086,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	201.972.414,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	48.027.586,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	250.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(201.972.414,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Jatiayu, 24 Desember 2025

Lurah

TTD

Wasito, S.E